Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dika Ayu Nur Aisyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dikaaisyah21@gmail.com

Abstrak:

Konflik keluarga kerap terjadi di tengah masyarakat, terutama terkait pembagian tanah warisan. Salah satunya adalah terjadinya perebutan tanah warisan karena salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak, seperti yang terjadi di desa Belotan, kecamatan Bendo, kabupaten Magetan. Meski konflik tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah, namun keluarga yang berkonflik lebih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi serta menguraikan penyelesaian konflik tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder melalui buku, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perebutan tanah warisan tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara para ahli waris. Kasus berawal dari tanah warisan yang dijual oleh salah satu ahli waris setelah adanya pembagian harta warisan secara sah, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga tersebut berdasar Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Meski pembagian tersebut terdapat penyimpangan dari sistem kewarisan Islam yaitu pembagian 2 : 1, namun asalkan pembagian tersebut telah disetujui ahli waris dengan suka rela, maka hal tersebut tidak menjadi masalah.

Kata Kunci: Konflik keluarga; Tanah warisan; Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Konflik biasanya diidentikkan dengan tindak kekerasan.¹ Dalam setiap hubungan antar individu akan

¹ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 358.

selalu muncul dengan adanya konflik, tak terkecuali dengan hubungan keluarga. Konflik dalam keluarga biasanya terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antar anggota keluarga.

Belakangan diketahui banyak terjadi konflik yang ada di masyarakat berhubungan dengan harta tanah dalam pembagian waris. Hal itu biasanya terjadi karena tidak mendahulukan musyawarah bersama antar anggota keluarga. Meskipun dalam pembagiannya sudah sah secara ketentuan hukum pembagian waris, namun selalu ada pihak yang tidak menerima hasil pembagian tersebut. Akibatnya, terjadi perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Perihal semacam inilah yang bisa menyebabkan perpecahan antara keluarga. Konflik keluarga yang terjadi di masyarakat ini kerap terjadi, paling utama dalam pembagian warisan tanah. Banyak dari masyarakat yang memutus tali silaturahmi sebab berebut tanah hasil peninggalan. Tidak sering pula, kerap terjadi pembunuhan atau perkelahian antar keluarga.²

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga ibu SMN. Beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya laki-laki, bernama SP, SL, serta SMD. Dimana SP tidak menikah dan tidak mempunyai anak, SL menikah dengan TKN dan juga tidak mempunyai anak, sedangkan SMD menikah dengan WG dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama SPN. Dalam kasus ini, SMN mempunyai tanah perkebunan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semasa beliau masih hidup, tanah perkebunan tersebut dibagi sama rata kepada seluruh anak-anaknya sebagai harta waris. Namun, ada sisa tanah ladang yang dijual SL kepada SK (adik kandung TKN). Penjualan tanah ladang tersebut tidak diketahui oleh siapapun, termasuk saudara-saudaranya. Dua tahun kemudian, SK menjual kembali tanah tersebut kepada kakaknya (TKN). Sedangkan, SPN (anak dari SMD) yang telah lama di Kalimantan tiba-tiba pulang dan meminta hak tanah warisnya, namun tidak diberi karena tanah warisan sudah dijual. Dalam hal ini, SPN merasa dirugikan karena tidak mendapat harta warisan dari ayahnya karena semua harta waris telah dikuasai oleh TKN. Padahal nyatanya, sisa tanah waris tersebut adalah milik TKN. Disinilah terjadi perebutan tanah yang menimbulkan perselisihan antar keluarga sampai sekarang dan belum berhasil menemukan titik terang.

Mengenai konflik keluarga di atas jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyinggung tentang harta tanah warisan dapat dikaitkan dengan pasal 187 yang berbunyi: (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang, serta menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) a, b, dan c; (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam konflik keluarga yang terjadi tersebut.

Untuk mengetahui keaslian pada penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema pada artikel ini. Hal itu bertujuan untuk mencari keorisinalitas dan keterbaruan terhadap penelitian yang dilakukan. Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Shofwanul Mu'minin, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul "Konflik Keluarga Akibat Pembagian

² Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), 9.

Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Dusun Betiring, Desa Sumberagung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan”.³ Pada penelitian ini, pokok pembahasannya adalah mengenai adanya konflik keluarga dalam pembagian waris dengan sistem hibah yang dirasa hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Adapun penyelesaiannya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 211.

Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Aqil Hubab Khorillah, mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)”.⁴ Pembahasan penelitian ini terkait fokus pembagian waris agar sama rata dengan sistem hibah bagi petani tambak sesuai Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Wiwin Supriyani, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sragen”.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya adalah penyelesaian sengketa akibat pembagian warisan antar ahli waris, yang kemudian dalam pembahasannya lebih ditekankan pada pembagian sesuai hukum perdata.

Metode Penelitian

Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian empiris sosiologis dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk mempelajari mengenai bagaimana aturan itu diterapkan dalam praktiknya di masyarakat dengan menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat.⁶ Sumber data yang digunakan dalam artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap masyarakat, keluarga, dan pihak yang berkonflik. Sedangkan sumber data sekunder adalah informasi yang relevan dengan obyek penelitian, yang diperoleh dari literatur/buku, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan waris, serta Kompilasi Hukum Islam. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan kajian teori yang tercantum pada kajian pustaka dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah diperoleh terkait konflik keluarga.⁷ Metode yang digunakan dalam menentukan subjek adalah *purposive sampling* atau yang disebut dengan teknik sampel bertujuan, yaitu dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap subjek penelitian yang akan dilakukan terhadap objek penelitian.⁸ Pada penelitian ini

³ Muhammad Shofwanul Mu'minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.

⁴ Muhammad Aqil Hubab Khorillah, “Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>.

⁵ Wiwin Supriyani, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris Perspektif Hukum Perdata” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), <http://eprints.ums.ac.id/40501/>.

⁶ Ujjianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), 144.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

subjek penelitian terbagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah keluarga yang saling berkonflik dan kerabat yang mengetahui kronologi konflik. Kategori kedua adalah tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, dan perangkat Desa Belotan Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang dianggap lebih mengetahui bagaimana keadaan/konflik keluarga tersebut. Adapun alasan pemilihan subjek penelitian tersebut adalah karena permasalahan yang terjadi di lokasi tersebut belum banyak yang mengkaji dan meneliti.

Faktor Terjadinya Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Konflik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat ataupun berkeluarga. Konflik mencerminkan adanya ketidakcocokan (*incompatibility*), baik ketidakcocokan karena berlawanan atau karena perbedaan. Erikson menjelaskan bahwa konflik bisa terjadi karena tiga kevel, antara lain: (1) konflik terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik yang terjadi di dalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; dan (3) konflik yang terjadi dalam menentukan cara beradaptasi.⁹ Keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan. Konflik akan berdampak negatif bila tidak dikelola dengan efektif dan akan menjadi faktor yang menyumbang akibat negatif pada individu maupun keluarga secara keseluruhan.

Adanya konflik keluarga yang terjadi diakibatkan adanya ketidakterbukaan antar anggota keluarga, sehingga timbul perselisihan dalam pembagian harta waris. Hal itu terjadi di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, tepatnya dalam keluarga ibu SMN. Dalam konflik keluarga yang terjadi, sebenarnya terdapat kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dimana ibu SPN selaku pihak pertama merasa dirugikan karena tidak mendapat bagian harta warisan, beliau menjelaskan bahwa awalnya tanah waris tersebut berasal dari neneknya yang masih berbentuk letter C. Kemudian, tanah tersebut dikuasai semua oleh bapak SL selaku anak kedua dari ibu SMN. Beliau menjelaskan bahwa saat itu tanah tersebut belum menjadi warisan. Namun, entah darimana tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh bapak SL tanpa melibatkan saksi satupun. Kemudian akhirnya, terjadilah gugatan di Pengadilan.¹⁰

Selanjutnya, menurut ibu TKN (istri dari alm. Bapak SL) menjelaskan bahwa ketika ibu SMN masih hidup, warisan itu sudah dibagi rata kepada ketiga anaknya, salah satunya kepada SMD. Sedangkan, warisan bapak SP, karena beliau meninggal dalam keadaan masih perjaka dan sewaktu sakit yang mengurus ibu TKN, maka warisan milik bapak SP digabung dengan SL sebagai biaya perawatan. Tanda bukti dan sertifikat tersebut ada dan lengkap semua. Kemudian, tahun 1998, suaminya ibu SP mengajukan diri sebagai kepala desa di Nganjuk sehingga membutuhkan uang banyak. Terdapat perjanjian antar penerima waris, termasuk ibu SPN, bahwa jika beliau meminta bagian sawah, maka tidak mendapat bagian yang lain. Akhirnya, mereka menjual tanah warisan milik bapaknya ibu SPN (Bapak SMD). Ternyata, pada saat pemilihan kepala desa, suami bu SPN kalah. Lalu, mereka merantau ke Kalimantan. Sewaktu pulang dari Kalimantan, ibu SPN meminta semua bagian waris milik bapaknya tadi. Namun, karena semua tanah waris telah bersertifikat atas nama TKN dan sudah

⁹ Sri Lestari, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 99.

¹⁰ Supinah, Wawancara, (Magetan, 15 Oktober 2021).

ada perjanjian di awal, maka SPN tidak mendapat bagian harta warisan. SPN tidak mengakui bahwa beliau sudah menjual sebagian tanah waris tersebut. Beliau masih merasa sebagai ahli waris penuh terhadap tanah waris milik bapaknya. Kemudian, beliau menggugat ibu TKN karena merasa tidak mendapat lagi bagian tanah waris milik bapaknya, padahal sebelum beliau sudah menandatangani dan menyetujui semuanya. Namun, yang dijual tidak diakui. Akhirnya, ibu SPN langsung menggugat ibu TKN ke Pengadilan tanpa membicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan.¹¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi pada keluarga adalah sistem pembagian waris dan saling memperebutkan haknya. Dalam artikel ini juga mencantumkan penjelasan dari kerabat keluarga yang berkonflik, sesepuh desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penjelasan dari beberapa informan diatas, bahwa adanya konflik keluarga tersebut karena ketidakadilan dalam sistem pembagian harta waris. Ada yang tidak terima dengan hasil pembagian waris, hingga akhirnya saling berebut. Akhirnya, terjadi tuntutan-sesama keluarga. Padahal sebenarnya dalam konflik keluarga tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata tidak bisa terselesaikan.¹² Sesepuh dan kerabat menduga adanya pihak ketiga dalam konflik keluarga ini, karena awalnya yang muda (ibu SPN) mau diajak berunding terlebih dahulu.¹³ Namun, beliau berubah pikiran setelah mendapat hasutan dari suami dan pihak lain. Akhirnya keluarga yang berkonflik memilih melalui jalur hukum. Penjelasan yang sama juga dituturkan oleh tokoh agama desa tersebut, bahwa biasanya apabila ada konflik keluarga mengenai waris, dirundingkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan melibatkan tokoh agama sebagai penengah. Namun, dalam konflik keluarga yang terjadi pada keluarga ibu SMN, tokoh agama tidak diikutsertakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga tidak tahu perkembangan masalah yang terjadi. Mereka lebih memilih langsung ke ranah hukum.

Umumnya, terdapat 3 sistem pembagian harta waris yang biasa terjadi di masyarakat, antara lain: (1) Sistem pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tertuang dalam ilmu faraid; (2) Sistem pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan (3) Sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Adat. Kenyataannya, pembagian waris dalam masyarakat menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Hal tersebut karena adanya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan berbagai macam kebudayaan. Namun, tentunya pembagian harta waris tetap disesuaikan dengan pembicaraan secara kekeluargaan.

Masyarakat Desa Belotan sendiri, untuk saat ini dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum adat atau tradisi turun-temurun yaitu membagi harta waris dengan jalan musyawarah antara penerima waris dengan pembagian 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor yang menyebabkan desa Belotan menerapkan pembagian waris seperti ini, yaitu: (1) Dianggap sebagai keputusan yang sah dan adil karena mendapatkan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan; (2) Masyarakat desa Belotan kesulitan menerapkan sistem pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu 2:1 karena menurut mereka hal itu tidak adil dan akan merugikan salah satu pihak. Namun, ada juga masyarakat yang menerapkan pembagian harta 2:1 tergantung situasi yang ada. Ada pula pewaris yang menghibahkan sebagian besar hartanya untuk masjid dan sisanya diberikan kepada ahli waris, namun hal itu dilakukan atas

¹¹ Tukinem, Wawancara, (Magetan, 14 Oktober 2021).

¹² Sayem, Wawancara, (Magetan, 29 September 2021).

¹³ Sukatinem, Wawancara, (Magetan, 28 September 2021).

musyawarah bersama antara pewaris dan ahli waris. Hal itu tergantung pada pribadinya masing-masing.

Adapun jika dalam pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dibagi 2:1¹⁴ dimana anak laki-laki mendapat bagian 2 lebih besar dibanding anak perempuan. Sedangkan, pembagian waris berdasarkan hukum adat biasanya orang tua membagi harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana pada sistem pembagiannya seringkali menggunakan sistem wasiat. Maksudnya disini adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai penggunaan harta benda yang dimiliki, kelak jika di kemudian hari yang bersangkutan telah wafat. Hal itu ditujukan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama, namun itu seringkali menimbulkan konflik karena dianggap tidak adil mengenai besaran harta warisan yang di bagi.¹⁵

Kasus ini pun akhirnya sampai di ranah Pengadilan Negeri Magetan, dimana ibu SPN menggugat ibu TKN atas gugatan balik nama tanah warisan tersebut. Namun, ternyata gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan karena ada beberapa faktor, antara lain: (1) Bahwa SPN adalah ahli waris dari alm. SMG dan alm. SMN serta alm. SMD yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan SMG yang diberikan kepada SMN dan diwariskan kepada ahli waris SMN, sehingga perbuatan TKN bersama suaminya (SL) menguasai objek sengketa serta seluruh proses jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan sampai dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum; (2) Bahwa gugatan SPN tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan SPN kurang pihak; (3) Bahwa gugatan SPN kabur atau tidak jelas; dan (4) Bahwa gugatan SPN mengandung cacat formil *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat), maka gugatan SPN sebagai penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Melihat dari hasil putusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah yang telah disertifikatkan tersebut tetap menjadi milik TKN dan SPN tidak mendapat bagian apapun, karena sebelumnya telah menjual tanah warisan bapaknya, namun beliau tidak mau mengakui. Dari sini konflik masih terus berjalan.

Dalam teori konflik dijelaskan bahwa konflik itu sifat alami manusia, dimana sifat manusia itu cenderung saling memusuhi dan saling bersifat kompleks dalam kekuasaan.¹⁶ Konflik juga bisa muncul akibat kesalahan persepsi atau kesalahan komunikasi dalam hubungan, termasuk keluarga.¹⁷ Dalam teori ini, jika dikorelasikan dengan hasil wawancara dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi akan terjadinya konflik pada keluarga akibat pembagian harta warisan ini adalah sifat alami pada manusia yang cenderung saling memusuhi jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam hal ini, apabila mengacu pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 109.

¹⁵ Nur Iftitah Rahma, *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris*, Jurnal Vol. 10 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 6.

¹⁶ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3 No.1 (2017), 34.

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), 101.

warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Kemudian, dipertegas kembali dalam Pasal 189 yang menyatakan bahwa : (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan; (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.¹⁸ Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada keluarga ibu SMN. Namun, diketahui luas tanah warisan tersebut secara keseluruhan adalah 5.390 M² dan sudah dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris dan mereka menyetujui hal itu. Akan tetapi, ibu SPN sebagai ahli waris pengganti ayahnya disini memiliki kepentingan tersendiri sehingga memerlukan sejumlah uang untuk kebutuhannya. Hal itu tetap diperbolehkan sesuai dalam ayat (2) pasal 189 tersebut. Namun, ibu SPN disini tidak membayar harga tersebut kepada ahli waris yang lain dan berdalih melupakannya bahwa ia pernah menjual tanah tersebut. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Sejatinya, harta warisan milik ibu SPN telah habis dijualnya dan ia tidak berhak menerima harta warisan yang lain. Namun dalam hal ini, ibu SPN tidak mau kalah dan tetap memperjuangkan haknya.

Penyelesaian Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam masalah konflik keluarga yang terjadi, pasti ada jalan keluar atau solusi untuk mengatasinya. Begitu juga dengan permasalahan waris dalam keluarga ibu SMN ini. Terdapat beberapa penjelasan yang diuraikan oleh keluarga yang berkonflik. Adapun penyelesaian konflik diatas dapat menggunakan teori sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.¹⁹

Jika ditinjau dari teori konflik menurut Soerjono Soekanto, hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apabila ditinjau lebih jauh lagi, sebenarnya konflik keluarga yang terjadi mempunyai tujuan untuk melindungi tanah waris sisa yang ada yang dulu diberikan oleh ahli waris kepada penerima waris. Dalam hal ini menurut peneliti, kedua pihak mempunyai kewenangan masing-masing dalam mempertahankan haknya. Namun, cara mereka menyelesaikan permasalahan ini tidak melalui jalur mediasi atau secara musyawarah. Sehingga, menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan masuk melalui jalur hukum.

Adapun solusi untuk permasalahan tersebut seharusnya dengan membagi harta waris berdasarkan ketentuan yang harusnya didapat oleh masing-masing penerima waris, lalu dikalkulasi nominalnya semua terlebih dahulu, selanjutnya ditunjukkan bagiannya sesuai dengan pembagian hukum Islam. Hal itu dilakukan untuk menghindari

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 111.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11.

ketidakadilan dalam pembagian harta waris sebab semua ahli waris sudah menerimanya dengan kerelaan hati masing-masing. Hal itu sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyebutkan bahwasannya : *“Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya.”* Hal itu juga sesuai dengan penjelasan teori sosiologi hukum diatas yang menjelaskan secara sosiologis, setiap masyarakat yang dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum. Untuk itu, fungsi hukum disini adalah untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat, termasuk menyelesaikan problem sosial yang muncul.

Adapun jika dilihat dalam hukum kewarisan Islam sendiri, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan orang tuanya. Anak laki-laki hanya menerima sisa bagian setelah diambil labian oleh ahli waris *dzawil furud* yang termasuk ahli waris mutlak.²⁰ Adapun yang dimaksud ahli waris mutlak adalah ahli waris yang harus mendapat harta warisan apabila memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian anak laki-laki lebih besar dua kali dibanding bagian anak perempuan (QS. An-Nisa : 11).

Jika dilihat dari ketentuan bagian harta warisan *dzawil furudh* untuk penyelesaian kasus ini, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bagian. Sisa harta bagian harta warisan tersebut kemudian dapat dibagi kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian sama rata, dengan masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{6}$ bagian.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1, yaitu : (1) Menurut hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Mengenai hak cucu, cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris dengan besaran sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris.

Kedudukan ibu SPN disini adalah sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hal itu sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”* Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, maka cucu juga mendapat bagian yang sama sesuai dengan bagian yang diterima oleh ayahnya. Dalam hal ini, ahli waris yang digantikan itu juga meliputi garis lurus ke bawah dan juga menyamping. Jadi, selain meliputi cucu dari pewaris baik dari anak- laki-laki ataupun perempuan, juga dapat meliputi anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu, namun tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.²¹

²⁰ Muhammad Noor, *Pola Pembagian Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak laki-laki dan Anak perempuan*, Jurnal Hukum, (STAIN Samarinda, 2010), 10.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 200.

Penyelesaian konflik waris dalam kasus ini yaitu dengan membagi sama rata bagian ketiga anak laki-laki tersebut, dengan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang juga berhak mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang lain. Hal itu guna meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga. Di samping itu, ketika terjadi konflik sebaiknya lebih dimusyawarahkan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perangkat desa setempat untuk menghindari kesenjangan sosial dalam keluarga.

Kesimpulan

Adanya konflik keluarga akibat tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Dusun Jajar, Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial antar ahli waris yang mengakibatkan pembagian yang tidak merata, serta terdapat kesalahpahaman dalam keluarga. Adanya konflik keluarga tersebut juga disebabkan karena adanya hasutan pihak ketiga dari salah satu ahli waris, sehingga menimbulkan terjadi konflik yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan.

Penyelesaian konflik keluarga mengenai harta waris yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Sehingga, dalam hal ini pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dapat dibagi sama rata, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pembagian warisan di Desa Belotan, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Meski pembagian tersebut terdapat penyimpangan dari sistem kewarisan Islam yaitu pembagian 2 : 1, namun asalkan pembagian tersebut sudah memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan di awal, atau semua ahli waris sudah menerimanya dengan suka rela, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila terjadi konflik seperti permasalahan di atas, maka baiknya diselesaikan musyawarah secara kekeluargaan dengan didampingi tokoh agama dan perangkat desa dengan tujuan untuk memberi pengertian dan arahan kepada keluarga yang hendak membagi harta warisan.

Daftar Pustaka

- Khoirillah, Muhammad Aqil Hubab Khorillah. "Sistem Bagi Waris dengan Hibah bagi Petani Tambak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/22330/>.
- Kuncoro, Wahyu. *Waris Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.
- Lestari, Sri Lestari. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lestari, Sri. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Mu'minin, Muhammad Shofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/21107/>.
- Noor, Muhammad. *Pola Pembagian Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak laki-laki dan Anak perempuan*, Jurnal Hukum, STAIN Samarinda, 2010.
- Partanto, Pius A. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.
- Prayitno, Ujianto Singgih. *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Azza Grafika, 2011.
- Rahma, Nur Iftitah. *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris*. Jurnal Vol. 10 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980.
- Supriyani, Wiwin. "Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan antar Ahli Waris Perspektif Hukum Perdata", Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016. <http://eprints.ums.ac.id/40501/>.
- Tualeka, Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern", Jurnal Al-Hikmah, Vol. 3 No.1 2017.